



Tiga Pejabat Dinas PUPR Badung Diperiksa

Terkait Dugaan Korupsi Senderan Tukad mati

DENPASAR - Tiga pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Badung, Selasa (23/5) kemarin menjalani pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar. Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi senderan Tukad Mati, Badung.

Kepala Kejari (Kajari) Denpasar, Erna Normawati Widodo Putri didampingi Kasi Intelejen IGNA Kusumayasa Diputra menyebutkan, ketiga pejabat yang diperiksa penyidik Kejari itu diantaranya Kadis PUPR Badung, IB Surya Suamba selaku pejabat

pengguna anggaran (PPA), Kabid Sumber Daya Air PUPR Badung AA Gde Dalem selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dan anggota Panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) I Gede Suardana. "Hari ini kami melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang dari Badung sebagai saksi guna memperdalam penyidikan umum terkait senderan Tukad Mati yang dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan," jelas Erna.

Dijelaskan, dalam kasus ini penyidik setidaknya juga telah memeriksa belasan saksi.

Secara umum, kata Erna, jumlah saksi yang akan diperiksa dan sudah diperiksa mulai dari kepanitian hingga rekanan penyedia barang dan jasa.

"Sementara ini yang sudah kami periksa kalau tidak salah ada 11-

orang. Kalau untuk semua saksi, ada sekitar 20-an. Saksi mulai dari kepanitian termasuk penyedia barang dan jasa. Untuk Direktur PT Undagi Jaya Mandiri Sanur sudah dilakukan pemeriksaan. Tapi untuk anggota dan stafnya di lapangan belum diperiksa. Masih ada beberapa saksi lagi yang akan diperiksa," ujar Erna.

Terkait pernyataan kadis PURP Badung di media massa yang mengatakan proyek itu masih dalam tahap pemeliharaan, Erna dengan tegas menyatakan dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan sudah jauh dari masa pemeliharaan. Menurutnya, masa pemeliharaan terjadi dari Januari sampai Juni 2016. Sedangkan penyelidikannya masuk Oktober 2016. "Kalau dikatakan sudah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap senderan tukad mati itu,

perbaikannya sendiri itu dilakukan setelah kami melakukan penyelidikan. Penyelidikannya kan Oktober 2016. Perbaikannya dilakukan setelah kami melakukan penyelidikan dan turun ke lapangan. Saat itu, yang kami tahu baru akan dilakukan perbaikan. Yang kami ketahui seperti itu. Bukan perbaikan di masa pemeliharaan atau masa sebelum pekerjaan itu diserahkan Desember 2016," terangnya.

Selain itu kata Erna, jika dihitung angka dari dananya, maka hanya lima persen.

"Sementara 95 persen dana sudah diberikan atau dicairkan. Makanya kami akan periksa juga bagian keuangannya. Kapan dana itu diserahkan sesuai tahapan termin yang sudah tertantum atau tertuang di dalam kontrak itu," jelasnya.

Edisi : Rabu, 24 Mei 2017

Hal : 23



Radar Bali

Sedangkan mengenai tersangka, Erna mengatakan, penyidik tengah mendalami keterangan dari puluhan saksi yang sudah dan akan diperiksa. Setelah hasil pemeriksaan, lanjut Erna baru bisa menetapkan tersangka. "Sekarang kami masih perdalam, dan ada 20 orang lebih yang sudah dan akan diperiksa dan masih bisa berkembang. Setelah diperdalam dan hasilnya seperti apa dari hasil penyidikan nanti baru bisa tahu ketika ekspose siapa saja yang akan menjadi tersangka," ujarnya.

Erna pun menyebutkan, ada pihak yang berpeluang menjadi tersangka dalam kasus ini. "Yang berpeluang (tersangka) pasti ada dari penyedia barang dan jasa. Itu harus ada yang dipertanggungjawabkan. Kami kembalikan ke tupoksi masing-masing. Apa yang mereka lakukan dan apa yang harus mereka pertanggungjawabkan jelas di sana," ucapnya.

Sementara mengenai kerugian negara, Perempuan pertama yang menjabat sebagai Kejari Denpasar ini menjelaskan, dari



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

HINDARI WARTAWAN: Kadis PUPR Badung, IB Surya Suamba berjalan cepat menghindari wartawan usai diperiksa penyidik kemarin.

hasil pemeriksaan dan kajian tim kualifikasi teknis (ahli) nantinya bisa menjadi acuan BPKP Bali dalam menghitung kerugian negara. "Kalau dari kerugian negara yang dihitung oleh in-

stansi yang berwenang, belum. Tetapi saat masuk ke penyidikan umum, kami sudah mengantongi hasil dari pengujian dari tim kualifikasi teknis. Sudah jelas di situ ada kualitas maupun volume tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada," ujarnya.

"Dari sisi kualitas aturan satu banding empat ternyata dikerjakan satu banding sepuluh. Kemudian dari sisi volume juga demikian. Hasil dari tim kualifikasi teknis yang sudah melakukan pemeriksaan dan penelitian ada (kerugian negara) sekitar Rp 700 juta," pungkas Erna.

Sayangnya, sejumlah media yang hendak mengkonfirmasi langsung hasil pemeriksaan kepada Kadis PUPR Badung gagal. Bahkan saat ditunggu di depan lobi hingga petang, Suamba bersama dua pejabat memilih menghindar dan kabur melalui pintu jendela kejari. Ulah kadis PU ini sama persis dilakukan saat Kejari Denpasar memeriksa anggota Dewan Bali Bagus Suwitra Wirawan dalam kasus penipuan CPNS. (pra/dot)

Edisi : Rabu, 24 Mei 2017

Hal : 23